



Dinamika Sosial Kebijakan Kesehatan: Penyakit Kelamin dalam Modernisasi Militer Praja Mangkunegaran (1860–1910)

The Social Dynamics of Health Policy: Venereal Diseases in the Military Modernization of the Mangkunegaran Principality (1860–1910)

Lucia Arter Lintang Gritantin*, Universitas Khairun, Indonesia

Umar Hi. Rajab, Universitas Khairun, Indonesia

Rusli M. Said, Universitas Khairun, Indonesia

ABSTRACT

This study investigates the spread of venereal diseases, particularly syphilis and gonorrhea, in the Mangkunegaran Principality during the second half of the nineteenth century by examining the interplay between military modernization, colonial governance, and public health. It addresses the question of how the Mangkunegaran authorities responded to the growing prevalence of these diseases amid increasing interaction with the Dutch colonial administration. Employing the historical method through heuristic inquiry, source criticism, interpretation, and historiography, the study analyzes archival records, colonial regulations, and contemporary historical sources, with particular attention to the *Reglement op de Publieke Vrouwen* (1852). The findings demonstrate that the spread of venereal diseases was closely associated with military mobility, prostitution, and expanding colonial social networks, prompting the adoption of more systematic health surveillance and regulatory measures. These developments marked a gradual transition from indigenous healing practices toward institutionalized public health policies shaped by colonial medical discourse. The study concludes that the management of venereal diseases in Mangkunegaran reflected not only medical concerns but also broader transformations in state administration, social control, and colonial intervention in nineteenth-century Java.

ARTICLE HISTORY

Received 28/05/2026
Revised 19/06/2026
Accepted 27/06/2026
Published 29/06/2026

KEYWORDS

Colonial medicine; gonorrhea; Mangkunegaran; syphilis; venereal diseases.

*CORRESPONDING AUTHOR

✉ luciagritantin@unkhair.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.30743/mkd.v10i1.13781>

PENDAHULUAN

Pada dekade 1860-an, Mangkunegaran menempati posisi yang khas dalam lanskap politik dan militer di Jawa karena memiliki institusi militer tersendiri, yaitu Legiun Mangkunegaran. Keberadaan legiun tersebut mendorong tingginya mobilitas prajurit yang berinteraksi secara intensif dengan aktivitas ekonomi di pasar-pasar tradisional dan berbagai ruang sosial masyarakat. Intensitas mobilitas tersebut menjadikan penyakit menular seksual (PMS) sebagai persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga menyentuh aspek moral, disiplin, dan stabilitas militer. Lingkungan militer pada masa itu menempatkan standar moral sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembentukan disiplin prajurit sehingga pelanggaran terhadap norma kesusilaan dipandang dapat memengaruhi efektivitas institusi militer (Murti & Nasution, 2021).

Praja Mangkunegaran kemudian mengalami proses modernisasi militer yang mengukuhkan posisinya sebagai entitas politik dengan karakteristik berbeda di bawah naungan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berbeda dengan Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta, Mangkunegaran memiliki otonomi yang relatif kuat dalam mengelola kekuatan militernya melalui Legiun Mangkunegaran. Legiun tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pasukan seremonial, tetapi berkembang menjadi satuan militer profesional yang menerapkan standar infanteri, kavaleri, dan artileri bergaya Eropa. Profesionalitas militer tersebut meningkatkan mobilitas prajurit secara signifikan melalui perpindahan antar pos, kawasan latihan, dan wilayah pengamanan yang tersebar di berbagai daerah sehingga memperluas ruang interaksi sosial mereka.



Mobilitas prajurit yang semakin tinggi mempertemukan mereka secara rutin dengan pekerja perkebunan, pedagang pasar, serta kelompok perempuan penyedia jasa hiburan di berbagai kawasan ekonomi baru. Perspektif sosiologi kesehatan memandang jaringan kontak sosial yang luas dan bersifat anonim sebagai kondisi struktural yang mempercepat transmisi penyakit menular seksual karena rantai penularan melampaui batas-batas komunitas yang sebelumnya saling mengenal dan mengawasi secara sosial. Proses modernisasi militer tersebut pada akhirnya membentuk jalur-jalur baru penyebaran PMS yang sebelumnya belum berkembang dalam struktur sosial tradisional Mangkunegaran. Perubahan tersebut berlangsung seiring dengan transisi ekonomi Mangkunegaran menuju kapitalisme perkebunan yang semakin agresif sejak dekade 1860-an hingga akhir 1890-an di bawah kepemimpinan Mangkunegara IV (Hartanto & Hudiyanto, [2023](#)).

Modernisasi militer pada paruh kedua abad ke-19 berlangsung bersamaan dengan perubahan sosial yang mengikuti integrasi Mangkunegaran ke dalam sistem kolonial modern. Reformasi militer yang mengadopsi standar Eropa berhasil meningkatkan profesionalisme Legiun Mangkunegaran sekaligus memperluas pola mobilitas manusia dibandingkan periode sebelumnya. Pergerakan prajurit antar pos, kegiatan latihan militer, perjalanan pengawalan, serta keterlibatan mereka dalam aktivitas ekonomi lokal memperluas interaksi antara kelompok militer dan masyarakat sipil (Khofifah, [2023](#)). Kondisi tersebut menempatkan prajurit sebagai salah satu aktor yang berkontribusi terhadap perpindahan berbagai penyakit menular, termasuk PMS, yang mulai memperoleh perhatian serius dari administrasi kolonial maupun pemerintahan pribumi.

Ekspansi ekonomi berbasis perkebunan pada masa pemerintahan Mangkunegara IV semakin memperkuat dinamika sosial yang telah dibentuk oleh modernisasi militer. Pertumbuhan industri perkebunan meningkatkan arus modal, tenaga kerja, dan mobilitas penduduk sekaligus melahirkan pusat-pusat aktivitas baru di kawasan produksi, pasar, serta jalur transportasi. Kehadiran pekerja migran dari berbagai wilayah menciptakan masyarakat yang lebih heterogen dibandingkan komunitas agraris tradisional sebelumnya serta memperluas hubungan sosial antarkelompok. Perubahan tersebut turut mendorong berkembangnya prostitusi informal di kawasan perdagangan dan permukiman pekerja sehingga menyediakan kondisi yang kondusif bagi penyebaran PMS di kalangan masyarakat maupun personel militer (Kintaningtyas et al., [2023](#)).

Perspektif sosial-historis menunjukkan bahwa penyebaran PMS di Mangkunegaran tidak semata-mata merupakan fenomena biologis, melainkan juga mencerminkan transformasi struktur sosial yang berlangsung pada akhir abad ke-19. Modernisasi ekonomi dan militer mengubah pola mobilitas, gaya hidup, serta relasi sosial masyarakat sehingga menciptakan jaringan interaksi yang semakin luas. Interaksi yang intensif antara prajurit, pekerja perkebunan, pedagang, dan berbagai kelompok masyarakat lainnya memperbesar peluang terjadinya transmisi penyakit menular seksual. Kajian ini memandang kemunculan PMS sebagai konsekuensi tidak langsung dari proses modernisasi yang mengubah secara mendasar struktur kehidupan sosial masyarakat Mangkunegaran pada penghujung abad ke-19 (Fadila et al., [2024](#)).

Pemerintah Mangkunegaran bersama otoritas kolonial memandang persoalan penyakit menular seksual (PMS) sebagai isu yang melampaui aspek kesehatan individu. Penyakit tersebut dinilai berpotensi menurunkan efektivitas pasukan, mengurangi kesiapan tempur prajurit, serta meningkatkan beban ekonomi akibat kebutuhan pelayanan kesehatan yang semakin besar. Militer modern menempatkan kesehatan fisik prajurit sebagai salah satu unsur utama yang menentukan kekuatan negara sehingga pengendalian PMS menjadi bagian dari strategi untuk menjaga disiplin, produktivitas, dan kesiapan militer. Pandangan tersebut selaras dengan berkembangnya konsep kesehatan publik pada abad ke-19 yang menghubungkan kondisi kesehatan penduduk dengan stabilitas politik serta efisiensi administrasi pemerintahan (Kintaningtyas et al., [2023](#)).

Kajian mengenai PMS di Mangkunegaran memperlihatkan keterkaitan yang erat antara kolonialisme, modernitas, dan praktik kontrol sosial. Otoritas kolonial maupun pemerintah pribumi menerapkan pengawasan terhadap perilaku seksual masyarakat dan prajurit tidak hanya untuk menekan angka penularan penyakit, tetapi juga untuk mengelola populasi sesuai prinsip-prinsip negara modern. Berbagai kebijakan kesehatan, pengawasan moral, dan pembentukan norma sosial yang lebih ketat menjadikan tubuh prajurit serta masyarakat sebagai objek regulasi (Yuliyanti, [2022](#)). Kajian ini menunjukkan bahwa sejarah PMS di Mangkunegaran membuka ruang analisis yang lebih luas mengenai interaksi antara modernisasi militer, kapitalisme perkebunan, dan kekuasaan kolonial dalam membentuk kehidupan sosial masyarakat Jawa pada akhir abad ke-19.

Sejumlah penelitian mengenai sejarah kesehatan kolonial di Hindia Belanda selama ini lebih banyak memusatkan perhatian pada kebijakan kesehatan pemerintah kolonial, epidemi penyakit menular, serta pengelolaan rumah sakit dan sanitasi perkotaan. Kajian Boomgaard, Colombijn, dan sejumlah sejarawan kesehatan lainnya menunjukkan bahwa pemerintah kolonial lebih memprioritaskan penanganan penyakit yang dianggap mengancam produktivitas ekonomi dan stabilitas pemerintahan, seperti kolera, malaria, cacar, dan pes. Orientasi tersebut menyebabkan pembahasan mengenai penyakit menular seksual (PMS) hanya menempati posisi marginal dalam historiografi kesehatan kolonial. Akibatnya, dinamika penyebaran PMS di lingkungan kerajaan pribumi yang memiliki institusi militer modern belum memperoleh perhatian yang memadai dalam historiografi Indonesia (Colombijn, [2013](#)).

Berbagai penelitian mengenai prostitusi dan regulasi tubuh pada masa kolonial umumnya berfokus pada kota-kota pelabuhan dan pusat administrasi kolonial, seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Kajian-kajian tersebut menjelaskan keterkaitan antara mobilitas penduduk, praktik prostitusi, dan sistem pengawasan kesehatan yang diterapkan pemerintah kolonial terhadap perempuan pekerja seks. Perspektif tersebut berhasil memperlihatkan bagaimana kolonialisme memanfaatkan instrumen medis sebagai sarana pengendalian populasi. Sebagian besar penelitian tersebut tetap berorientasi pada wilayah perkotaan kolonial sehingga belum menjelaskan bagaimana mekanisme serupa berlangsung di lingkungan kerajaan *swapraja* yang memiliki karakter politik, sosial, dan militer yang berbeda, termasuk Mangkunegaran.

Kajian mengenai Legiun Mangkunegaran selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek organisasi militer, modernisasi pasukan, hubungan politik dengan pemerintah kolonial, serta perannya dalam menjaga stabilitas keamanan di Jawa. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa Legiun Mangkunegaran merupakan salah satu institusi militer pribumi paling modern pada abad ke-19 karena mengadopsi sistem pelatihan, disiplin, dan persenjataan bergaya Eropa. Penelitian-penelitian tersebut umumnya masih menempatkan modernisasi legiun dalam kerangka politik dan militer tanpa mengaitkannya dengan dimensi kesehatan masyarakat. Dampak sosial yang ditimbulkan oleh mobilitas prajurit terhadap penyebaran penyakit dan perubahan kehidupan masyarakat masih jarang dibahas secara mendalam sehingga aspek kesehatan sosial di lingkungan legiun menjadi tema yang penting untuk dieksplorasi (Hartanto & Hudiyanto, [2023](#)).

Kajian mengenai perkembangan ekonomi Mangkunegaran pada masa Mangkunegara IV juga lebih banyak menyoroti keberhasilan modernisasi ekonomi melalui pengelolaan perkebunan, industrialisasi gula, dan transformasi sistem agraria. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa ekspansi perkebunan berhasil mengubah struktur ekonomi sekaligus meningkatkan pendapatan Praja Mangkunegaran secara signifikan. Perubahan ekonomi tersebut juga mendorong meningkatnya mobilitas tenaga kerja, urbanisasi lokal, dan intensifikasi interaksi sosial antarkelompok masyarakat. Konsekuensi sosial dari proses tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat dan penyebaran PMS, belum menjadi perhatian utama penelitian terdahulu, padahal transformasi

ekonomi sering kali berlangsung bersamaan dengan perubahan pola penyakit dalam suatu masyarakat.

Telaah terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai sejarah kesehatan, modernisasi militer, dan transformasi ekonomi Mangkunegaran masih berkembang secara terpisah. Penelitian ini mengintegrasikan ketiga dimensi tersebut dengan menempatkan PMS tidak hanya sebagai persoalan medis, tetapi juga sebagai produk interaksi antara mobilitas prajurit, ekspansi kapitalisme perkebunan, dan perubahan sosial yang menyertai proses modernisasi. Pendekatan tersebut menghadirkan perspektif baru mengenai peran institusi militer pribumi dalam membentuk jaringan penyebaran penyakit sekaligus menjadi objek pengawasan kesehatan kolonial. Penelitian ini juga menawarkan kontribusi historiografis yang berbeda dari kajian sebelumnya dengan menjadikan PMS sebagai pintu masuk untuk memahami relasi antara tubuh, kekuasaan, mobilitas, dan modernitas dalam masyarakat Mangkunegaran pada abad ke-19.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode sejarah yang mencakup empat tahapan utama, yaitu heuristik, verifikasi (kritik sumber), interpretasi, dan historiografi. Kajian ini berlandaskan perspektif sejarah sosial kesehatan yang memandang penyakit tidak hanya sebagai fenomena biologis, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam masyarakat. Peneliti mengumpulkan data melalui penelusuran sumber-sumber primer berupa arsip Pura Mangkunegaran, seperti *Serat Angger-Anggeran* dan laporan internal *Legioen van Mangkoenegoro*, serta dokumen kolonial berupa *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië* dan *Staatsblad* yang diperoleh melalui pangkalan data digital. Penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber sekunder mengenai sejarah kesehatan kolonial, prostitusi, dan kebijakan kesehatan di Jawa pada abad ke-19 untuk memperkuat analisis terhadap data primer (Herlina, [2020](#); Putri & Ribawati, [2022](#)).

Peneliti melaksanakan tahap verifikasi melalui kritik eksternal dan kritik internal guna memastikan keaslian serta kredibilitas setiap sumber yang digunakan. Proses verifikasi memberikan perhatian khusus terhadap potensi bias dalam laporan kesehatan militer yang kemungkinan mereduksi jumlah kasus penyakit menular seksual demi menjaga citra Legiun Mangkunegaran di hadapan pemerintah kolonial. Peneliti kemudian membandingkan informasi yang diperoleh dari laporan militer dengan statistik kesehatan dalam dokumen kolonial sebagai bentuk *cross-check* terhadap validitas data. Langkah tersebut menghasilkan gambaran yang lebih objektif mengenai kondisi kesehatan serta dinamika penyebaran penyakit menular seksual di lingkungan Praja Mangkunegaran.

Peneliti menganalisis data yang telah diverifikasi melalui teknik triangulasi sumber dan pendekatan diakronis untuk mengidentifikasi pola perubahan penyebaran penyakit dalam konteks modernisasi militer dan transformasi ekonomi Mangkunegaran. Penafsiran terhadap istilah-istilah penyakit yang ditemukan dalam sumber berbahasa Jawa dilakukan dengan merujuk pada literatur medis historis sehingga menghasilkan padanan yang sesuai dengan terminologi kedokteran modern. Tahap historiografi menyusun seluruh fakta sejarah secara kronologis, sistematis, dan analitis agar mampu menjelaskan keterkaitan antara mobilitas militer, perkembangan ekonomi perkebunan, serta penyebaran penyakit menular seksual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyakit Menular Seksual dalam Konteks Militer Mangkunegaran

Keberadaan Legiun Mangkunegaran pada paruh kedua abad ke-19 menempatkan Praja Mangkunegaran pada posisi yang berbeda dibandingkan kerajaan-kerajaan Jawa lainnya. Legiun

tersebut tidak hanya menjadi simbol kedaulatan internal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen modernisasi militer yang terintegrasi dengan kepentingan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sebagai pasukan profesional yang menerapkan sistem pelatihan bergaya Eropa, Legiun Mangkunegaran memiliki mobilitas tinggi melalui kegiatan latihan, pengamanan wilayah, dan keterlibatan dalam berbagai operasi kolonial. Intensitas mobilitas tersebut memperluas interaksi prajurit dengan masyarakat sehingga secara tidak langsung meningkatkan peluang penyebaran penyakit menular seksual (PMS) di lingkungan militer maupun masyarakat sipil di sekitar garnisun (Gritantin, [2022](#)).

Arsip-arsip kolonial menyebut penyakit kelamin seperti sifilis dan gonore dengan istilah *venerische ziekten* atau *ziekten der ontucht*, yang secara eksplisit mengandung dimensi moral. Pemerintah Mangkunegaran memandang PMS bukan hanya sebagai persoalan medis, tetapi juga sebagai ancaman terhadap disiplin, moralitas, dan efektivitas tempur prajurit. *Serat Angger-Aggeran* Mangkunegaran menegaskan pentingnya tata susila prajurit, termasuk larangan terhadap perilaku yang dinilai merusak ketertiban serta kehormatan korps (Putriani & Suriani, [2026](#)). Perspektif tersebut menempatkan kesehatan seksual sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari regulasi militer sekaligus instrumen pengendalian moral dalam kehidupan sosial.

Keberadaan PMS di lingkungan Legiun Mangkunegaran menunjukkan bahwa modernisasi militer tidak selalu diikuti oleh peningkatan kualitas kesehatan prajurit. Reformasi militer yang menekankan disiplin, keteraturan organisasi, dan profesionalisme justru memperluas ruang interaksi sosial melalui meningkatnya mobilitas personel. Prajurit yang sebelumnya hidup dalam lingkup sosial lokal kemudian menjadi bagian dari jaringan mobilitas yang menghubungkan berbagai wilayah di Jawa. Kondisi tersebut memperlihatkan paradoks modernitas militer, yaitu meningkatnya kapasitas pertahanan bersamaan dengan munculnya risiko kesehatan yang semakin kompleks, sehingga PMS dapat dipahami sebagai salah satu konsekuensi sosial dari transformasi institusi militer menuju sistem yang lebih modern (Gritantin, [2024](#)).

Kajian ini menunjukkan bahwa tubuh prajurit memperoleh perhatian yang semakin besar dalam tata kelola pemerintahan pada abad ke-19. Pemerintah tidak lagi memandang kesehatan fisik prajurit sebagai urusan pribadi, melainkan sebagai aset strategis yang menentukan efektivitas institusi militer. Pergeseran tersebut mencerminkan perubahan pola pengawasan dari pendekatan yang semata-mata berbasis moral menuju sistem yang mengintegrasikan aspek moral, medis, dan administratif. Pengelolaan kesehatan prajurit kemudian menjadi bagian dari strategi mempertahankan produktivitas pasukan sehingga PMS diposisikan sebagai ancaman terhadap kepentingan politik dan keamanan Praja Mangkunegaran, bukan sekadar persoalan kesehatan individu (Handayani & Amini, [2024](#)).

Sumber-sumber kolonial memperlihatkan bahwa pemerintah mencatat kasus penyakit menular seksual secara sistematis melalui laporan kesehatan militer. Praktik pencatatan tersebut mencerminkan berkembangnya sistem pengawasan kesehatan yang semakin terinstitusionalisasi pada penghujung abad ke-19. Administrasi kolonial menerapkan paradigma kesehatan modern yang berupaya mengukur, mengklasifikasikan, dan mengendalikan penyakit melalui mekanisme birokrasi. Pengaruh administrasi kolonial tersebut turut membentuk cara Praja Mangkunegaran memahami, mendokumentasikan, dan menangani persoalan kesehatan di lingkungan militernya.

Analisis terhadap kasus PMS di Mangkunegaran memperlihatkan keterkaitan yang erat antara ruang militer dan ruang sosial yang selama ini sering dipisahkan dalam kajian sejarah. Penyebaran penyakit tidak hanya berlangsung di dalam barak atau lingkungan legiun, tetapi juga berkembang melalui interaksi prajurit dengan masyarakat di sekitar pusat-pusat aktivitas ekonomi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa kesehatan militer dan kesehatan masyarakat saling memengaruhi

dalam proses perubahan sosial yang berlangsung sepanjang abad ke-19. Perspektif ini menempatkan kajian kesehatan militer sebagai bagian integral dari sejarah sosial yang menjelaskan hubungan timbal balik antara institusi militer dan masyarakat.

Penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dari kajian militer konvensional yang umumnya berfokus pada organisasi, strategi, dan peran politik Legiun Mangkunegaran. Kajian terhadap penyakit menular seksual membuka ruang analisis baru mengenai kehidupan sehari-hari prajurit, pola interaksi sosial, serta dampak modernisasi terhadap kesehatan mereka. Pendekatan tersebut memperluas cakupan sejarah militer dengan menempatkan tubuh, kesehatan, dan pengalaman sosial sebagai unsur penting dalam dinamika institusi militer. Sudut pandang ini memperlihatkan bahwa Legiun Mangkunegaran tidak hanya berfungsi sebagai kekuatan bersenjata modern, tetapi juga sebagai ruang sosial yang merefleksikan berbagai perubahan dalam masyarakat Jawa pada akhir abad ke-19.

Fenomena penyakit menular seksual di lingkungan Legiun Mangkunegaran juga memperlihatkan adanya ketegangan antara idealitas prajurit yang dibangun oleh institusi militer dan realitas sosial yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dokumen-dokumen normatif menggambarkan prajurit sebagai sosok yang disiplin, loyal, dan menjaga kehormatan korps, sedangkan sumber-sumber kesehatan menunjukkan bahwa kehidupan militer tidak sepenuhnya dapat dikendalikan melalui regulasi formal. Berbagai ruang sosial di luar pengawasan institusi memungkinkan terbentuknya praktik, relasi, dan perilaku yang tidak selalu sejalan dengan norma yang ditetapkan. Perspektif sejarah sosial menunjukkan bahwa pembentukan identitas militer pada abad ke-19 berlangsung melalui proses negosiasi yang terus-menerus antara tuntutan institusional, kebutuhan individual, dan dinamika sosial di sekitar pusat-pusat aktivitas ekonomi. Keberadaan PMS menjadi indikator yang memperlihatkan batas efektivitas kontrol institusi terhadap perilaku anggotanya sekaligus mengungkap dimensi kehidupan prajurit yang jarang muncul dalam narasi resmi militer (Anugrah et al., [2023](#); Kintaningtyas et al., [2023](#); Yuliyanti, [2022](#)).

Prostitusi, Pasar, dan Ruang Sosial Penyebaran Penyakit

Interaksi antara prajurit dan masyarakat sipil di Mangkunegaran berlangsung secara erat melalui aktivitas di pasar-pasar tradisional dan pusat hiburan yang berkembang di wilayah Surakarta dan sekitarnya. John Ingleson menunjukkan bahwa prostitusi di Jawa mengalami perkembangan pesat pada abad ke-19 seiring meningkatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis uang. Pasar di wilayah Mangkunegaran tidak hanya berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang mempertemukan berbagai kelompok masyarakat, termasuk prajurit, buruh perkebunan, pedagang, dan pekerja seks. Intensitas interaksi antarkelompok tersebut membentuk jaringan sosial yang memperbesar peluang penyebaran penyakit menular seksual (PMS) di lingkungan masyarakat maupun militer (Fadila et al., [2024](#)).

Arsip kolonial mencatat meningkatnya kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda terhadap penyebaran PMS di kalangan militer pribumi. Laporan kesehatan dalam *Regeeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië* menunjukkan bahwa penyakit kelamin menjadi salah satu penyebab utama ketidakhadiran prajurit dari dinas aktif. Peneliti perlu membaca data tersebut secara kritis karena aparat militer berpotensi mereduksi angka prevalensi untuk mempertahankan citra profesionalisme pasukan. Potensi bias tersebut menunjukkan bahwa laporan kesehatan kolonial tidak hanya merekam kondisi medis, tetapi juga merefleksikan kepentingan administratif dan politik yang melatarbelakangi proses penyusunannya.

Praja Mangkunegaran menghadapi persoalan yang lebih kompleks karena memiliki otonomi internal dalam mengelola urusan pemerintahannya. Pemerintah kolonial tidak dapat sepenuhnya

menerapkan regulasi kesehatan, seperti sistem *regulated prostitution* yang diberlakukan di Batavia atau Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan pengawasan terhadap pekerja seks dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan berlangsung secara sporadis serta belum terorganisasi secara sistematis. Perbedaan kapasitas kelembagaan antara wilayah kolonial langsung dan *swapraja* akhirnya membentuk variasi dalam pengelolaan kesehatan publik pada akhir abad ke-19.

Keberadaan pasar sebagai ruang pertemuan berbagai kelompok sosial menunjukkan bahwa penyebaran PMS tidak dapat dijelaskan hanya melalui pendekatan medis. Pasar berfungsi sebagai simpul yang mempertemukan aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, dan pertukaran informasi yang berlangsung secara intensif. Ruang sosial semacam ini menciptakan jaringan hubungan yang melampaui batas administratif maupun status sosial sehingga membuka peluang terjadinya kontak antarkelompok secara berulang. Pola interaksi tersebut memperluas kemungkinan transmisi penyakit dan memperlihatkan bahwa perubahan pola penyakit berjalan seiring dengan transformasi struktur ruang sosial dalam masyarakat (Sarip et al., 2025; Victor et al., 2025).

Pertumbuhan ekonomi perkebunan pada masa pemerintahan Mangkunegara IV mengubah karakter mobilitas penduduk di wilayah Mangkunegaran secara signifikan. Arus pekerja, pedagang, penyedia jasa, dan kelompok pencari nafkah lainnya menciptakan dinamika sosial yang lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan mobilitas tersebut membentuk lingkungan sosial yang lebih terbuka sekaligus mengurangi efektivitas kontrol komunitas tradisional terhadap perilaku individu. Masyarakat yang sebelumnya hidup dalam relasi sosial yang relatif dekat kemudian menghadapi pola interaksi yang semakin anonim sehingga menciptakan kondisi yang mendukung penyebaran PMS pada akhir abad ke-19 (Anugrah et al., 2023).

Perspektif sejarah sosial kesehatan menunjukkan bahwa penyebaran penyakit tidak hanya ditentukan oleh keberadaan individu yang terinfeksi, tetapi juga oleh konfigurasi hubungan sosial yang menopangnya. Jaringan pasar, tempat persinggahan, jalur perdagangan, dan kawasan permukiman pekerja membentuk ekosistem sosial yang mempercepat perpindahan manusia sekaligus penyebaran penyakit. Kajian ini menempatkan PMS sebagai salah satu konsekuensi sosial dari semakin intensifnya integrasi ekonomi regional pada abad ke-19. Penyakit dalam konteks tersebut merefleksikan meningkatnya keterhubungan antarkelompok masyarakat yang sebelumnya hidup dalam lingkup sosial yang lebih terbatas.

Keterbatasan pengawasan kesehatan di Mangkunegaran memperlihatkan adanya kesenjangan antara agenda modernisasi administrasi dan kapasitas institusional yang tersedia. Berbagai kebijakan kesehatan yang berkembang di lingkungan kolonial tidak selalu dapat diterapkan secara efektif pada wilayah *swapraja* yang memiliki sistem pemerintahan sendiri. Situasi tersebut menyebabkan tanggung jawab pengawasan kesehatan tersebar di antara berbagai otoritas tanpa mekanisme koordinasi yang memadai. Perbedaan tersebut pada akhirnya menciptakan tingkat pengendalian penyakit yang tidak seragam antara wilayah kolonial langsung dan wilayah yang berada di bawah pemerintahan pribumi (Alifatur, 2017).

Kajian ini memperlihatkan bahwa penyakit menular seksual dapat digunakan sebagai lensa analisis untuk memahami perubahan sosial yang lebih luas di Mangkunegaran. Keberadaan PMS tidak hanya mencerminkan persoalan kesehatan individu, tetapi juga merekam transformasi ekonomi, perubahan pola mobilitas, dan berkembangnya ruang-ruang sosial baru yang muncul sebagai konsekuensi modernisasi. Pendekatan tersebut memperluas cakupan analisis sejarah dengan menempatkan penyakit sebagai bagian dari dinamika perubahan masyarakat, bukan sekadar objek kajian medis. Perspektif ini menjadikan PMS sebagai sumber penting untuk memahami hubungan antara ekonomi, ruang sosial, dan kekuasaan dalam masyarakat kolonial.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa penyebaran PMS di Mangkunegaran berlangsung melalui mekanisme yang bersifat struktural, bukan semata-mata dipengaruhi oleh perilaku individual. Penekanan yang berlebihan terhadap aspek moral sering kali mengaburkan faktor-faktor yang lebih mendasar, seperti meningkatnya mobilitas tenaga kerja, meluasnya jaringan perdagangan, dan tumbuhnya pusat-pusat ekonomi baru yang mempertemukan berbagai kelompok penduduk dalam satu ruang sosial. Perubahan struktur sosial tersebut menghasilkan kondisi yang memungkinkan penyakit berkembang di tengah proses modernisasi yang berlangsung cepat. Kapasitas institusi yang tidak mampu mengimbangi perubahan sosial akhirnya menjelaskan mengapa kasus-kasus PMS tetap muncul meskipun berbagai norma sosial dan regulasi telah diterapkan untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Modernitas Militer dan Kapitalisme Perkebunan

Dekade 1860-an hingga akhir abad ke-19 menandai berlangsungnya transformasi ekonomi Mangkunegaran di bawah kepemimpinan Mangkunegara IV. Pengembangan perkebunan tebu dan kopi yang terintegrasi dengan jaringan kapitalisme global meningkatkan arus tenaga kerja sekaligus memperluas sistem transportasi di wilayah tersebut. Pembangunan Stasiun Solo Balapan pada tahun 1870 menjadi simbol modernisasi infrastruktur yang mempercepat mobilitas manusia dan distribusi komoditas antardaerah (Mahardi et al., 2025). Perubahan tersebut menempatkan Mangkunegaran sebagai salah satu wilayah yang semakin terhubung dengan dinamika ekonomi kolonial pada akhir abad ke-19.

Perspektif sejarah medis menunjukkan bahwa peningkatan mobilitas manusia membawa konsekuensi langsung terhadap pola penyebaran penyakit. Peter Boomgaard menegaskan bahwa penyakit menular di Hindia Belanda kerap mengikuti perkembangan jalur transportasi dan aktivitas ekonomi. Dalam konteks Mangkunegaran, jaringan rel kereta api membentuk jalur baru yang menghubungkan garnisun militer dengan pusat-pusat ekonomi dan kawasan hiburan di kota-kota pesisir maupun pedalaman sehingga memperbesar peluang penyebaran penyakit menular seksual (PMS). Analisis diakronis terhadap data memperlihatkan peningkatan laporan penyakit kelamin di wilayah Surakarta setelah tahun 1870, yang menunjukkan bahwa modernitas tidak hanya menghadirkan kemajuan ekonomi, tetapi juga menghasilkan konsekuensi kesehatan yang signifikan bagi kelompok dengan mobilitas tinggi, terutama prajurit militer (Boomgaard, 2004).

Transformasi ekonomi pada akhir abad ke-19 memperlihatkan bahwa perkembangan kapitalisme perkebunan tidak hanya mengubah sistem produksi, tetapi juga membentuk kembali ritme kehidupan masyarakat Mangkunegaran. Integrasi dengan pasar regional dan internasional meningkatkan kebutuhan tenaga kerja sekaligus mendorong mobilitas penduduk dalam skala yang lebih luas. Perubahan tersebut melahirkan berbagai ruang sosial baru yang sebelumnya belum memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat lokal. Pertumbuhan kawasan perkebunan, pusat distribusi hasil produksi, dan simpul-simpul transportasi menciptakan lingkungan sosial yang semakin dinamis sekaligus lebih rentan terhadap perpindahan berbagai jenis penyakit (Kintaningtyas et al., 2023).

Perspektif sejarah sosial memperlihatkan bahwa modernitas tidak menghasilkan dampak yang seragam bagi seluruh kelompok masyarakat. Perluasan jaringan transportasi dan perdagangan memang memberikan manfaat ekonomi yang besar, tetapi pada saat yang sama meningkatkan risiko kesehatan akibat mobilitas manusia yang semakin intensif. Prajurit, pekerja perkebunan, pedagang, dan buruh transportasi menghadapi tingkat kerentanan yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang menjalani kehidupan relatif menetap. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko penyakit pada masa kolonial berkaitan erat dengan posisi individu dalam struktur ekonomi yang terus berkembang (Yuliyanti, 2022).

Analisis terhadap perkembangan infrastruktur menunjukkan bahwa jalur transportasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana distribusi komoditas, tetapi juga sebagai medium pembentukan konektivitas sosial. Infrastruktur modern mempertemukan individu dari berbagai latar belakang geografis, sosial, dan ekonomi dalam frekuensi yang semakin tinggi. Intensitas perjumpaan tersebut mempercepat pertukaran budaya, informasi, dan praktik sosial, termasuk perilaku yang berkaitan dengan kesehatan. Jaringan transportasi akhirnya berperan sebagai bagian dari transformasi sosial yang memperluas ruang interaksi manusia sekaligus meningkatkan peluang terjadinya transmisi penyakit.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa tubuh manusia ikut menjadi bagian dari proses integrasi ekonomi kolonial. Pergerakan komoditas perkebunan melalui jaringan distribusi yang semakin efisien berlangsung bersamaan dengan meningkatnya mobilitas manusia sebagai pelaku ekonomi. Dinamika tersebut mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus membuka jalur penyebaran penyakit menuju wilayah-wilayah yang sebelumnya relatif terisolasi. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa sejarah kesehatan tidak dapat dipisahkan dari sejarah transportasi dan perkembangan ekonomi karena ketiganya saling membentuk dalam proses transformasi sosial yang berlangsung secara bersamaan.

Kajian ini memperlihatkan bahwa hubungan antara modernitas dan kesehatan jauh lebih kompleks daripada anggapan bahwa kemajuan teknologi selalu menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Modernisasi infrastruktur dan ekspansi ekonomi memang meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keterhubungan antardaerah, tetapi juga memunculkan konsekuensi yang tidak selalu direncanakan. Penyakit menular seksual menjadi salah satu indikator yang menunjukkan bahwa proses modernisasi menciptakan bentuk-bentuk kerentanan baru yang sebelumnya belum muncul dalam skala yang sama. Perspektif tersebut memungkinkan sejarah Mangkunegaran dipahami tidak hanya sebagai narasi keberhasilan pembangunan ekonomi dan militer, tetapi juga sebagai ruang munculnya berbagai tantangan sosial yang menyertai proses modernisasi.

Sudut pandang historiografi menunjukkan bahwa hubungan antara kapitalisme perkebunan, mobilitas, dan kesehatan masih jarang memperoleh perhatian dalam kajian mengenai Mangkunegaran. Sebagian besar penelitian terdahulu menempatkan perkembangan perkebunan dan pembangunan infrastruktur sebagai indikator kemajuan ekonomi semata. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kedua proses tersebut juga menghasilkan perubahan sosial yang lebih kompleks, termasuk perubahan pola penyakit dan munculnya berbagai bentuk kerentanan baru dalam masyarakat. Pendekatan ini menempatkan penyakit menular seksual sebagai konsekuensi historis dari integrasi Mangkunegaran ke dalam jaringan ekonomi kapitalis kolonial pada akhir abad ke-19, bukan sekadar sebagai peristiwa kesehatan yang berdiri sendiri.

Penyakit kelamin di Mangkunegaran selalu berkaitan dengan diskursus moral yang berkembang dalam masyarakat Jawa. Berbagai teks Jawa menggunakan istilah *penyakit raja singa* untuk merujuk pada kondisi yang saat ini dikenal sebagai sifilis. Istilah tersebut memuat makna simbolik yang menghubungkan penyakit dengan perilaku menyimpang serta bentuk hukuman sosial terhadap pelakunya. Penafsiran menggunakan kamus medis Pigeaud memungkinkan istilah-istilah lokal tersebut dipadankan dengan terminologi medis Barat tanpa menghilangkan konteks budaya yang melatarbelakanginya (Khofifah, [2023](#)).

Kolonialisme memperkenalkan proses *medikalisasi* yang berupaya menggeser pemahaman penyakit dari persoalan moral menuju persoalan kesehatan publik. Masyarakat Mangkunegaran tetap mempertahankan diskursus moral sebagai bagian penting dalam memahami penyakit sehingga kedua perspektif tersebut berjalan secara berdampingan. Berbagai *serat* Mangkunegaran memperlihatkan bahwa sanksi sosial dan nasihat moral masih menjadi instrumen utama pengendalian perilaku,

sedangkan intervensi medis menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga kesehatan. Situasi tersebut mencerminkan ketegangan antara moralitas tradisional dan rasionalitas medis modern, ketika pemerintah kolonial berupaya menjaga kesehatan militer demi stabilitas politik, sementara elite Mangkunegaran mempertahankan otoritas moral dan budaya sebagai dasar legitimasi kekuasaan (Putriani & Suriani, [2026](#)).

Regulasi, Pengawasan, dan Resistensi Lokal

Pemerintah Mangkunegaran bersama otoritas kolonial menerapkan berbagai regulasi untuk mengendalikan penyebaran penyakit menular seksual (PMS) di lingkungan militer, mulai dari pemeriksaan kesehatan hingga pembatasan aktivitas prajurit di luar barak. Arsip-arsip kolonial memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan tersebut menghadapi berbagai bentuk resistensi terselubung, baik dari prajurit maupun masyarakat sipil. Sebagian masyarakat tetap mempertahankan praktik pengobatan tradisional karena akses terhadap dokter militer masih terbatas dan layanan kesehatan kolonial lebih banyak diarahkan untuk mendukung kepentingan administrasi serta militer pemerintah Hindia Belanda. *Staatsblad* Tahun 1852 merefleksikan arah kebijakan umum pemerintah kolonial dalam bidang kesehatan publik dan kesehatan militer, tetapi pelaksanaannya di wilayah semiotonom seperti Mangkunegaran menunjukkan tingkat efektivitas yang berbeda.

Status otonomi Praja Mangkunegaran memungkinkan pemerintah lokal menyesuaikan pelaksanaan kebijakan kesehatan dengan kondisi sosial dan politik setempat. Adaptasi tersebut memberikan keleluasaan bagi elite lokal untuk mempertahankan praktik-praktik yang dianggap sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus menciptakan celah dalam sistem pengawasan kesehatan kolonial. Interaksi antara regulasi kolonial, otoritas lokal, dan praktik sosial masyarakat membentuk proses pengendalian PMS yang berlangsung melalui negosiasi, kompromi, dan penyesuaian secara terus-menerus. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa pengendalian penyakit di Mangkunegaran tidak dapat dipahami sebagai penerapan kebijakan kolonial secara sepihak, melainkan sebagai hasil interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, kewenangan, dan cara pandang yang berbeda terhadap kesehatan (Gritantin, [2024](#)).

Penyebaran PMS di Mangkunegaran pada abad ke-19 memperlihatkan bahwa penyakit dapat digunakan sebagai pintu masuk untuk memahami relasi kuasa, modernitas, dan perubahan sosial dalam masyarakat kolonial. Keberadaan penyakit tidak hanya merefleksikan kondisi biologis, tetapi juga mencerminkan dinamika struktur ekonomi, pola mobilitas penduduk, serta nilai-nilai moral yang berkembang pada masanya. Penelitian ini menghindari pendekatan anakronistik dengan menempatkan respons terhadap PMS dalam konteks keterbatasan pengetahuan medis dan kuatnya pengaruh norma tradisional yang membentuk kebijakan maupun perilaku masyarakat. Perspektif historis tersebut menegaskan bahwa penyakit perlu dipahami sebagai bagian dari pengalaman sosial masyarakat Mangkunegaran yang terus bernegosiasi dengan proses modernisasi dan intervensi kolonial, sehingga penilaian berdasarkan standar moral abad ke-21 tidak dapat diterapkan secara langsung terhadap realitas abad ke-19.

Penyebaran penyakit menular seksual pada masa kolonial juga memperlihatkan bahwa kesehatan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari perubahan organisasi ruang yang berlangsung secara cepat. Perkembangan kawasan perkebunan, pusat perdagangan, jalur transportasi, dan permukiman pekerja menciptakan ruang interaksi yang semakin padat serta memperbesar intensitas pertemuan antarkelompok masyarakat. Ruang-ruang tersebut mempertemukan individu yang berasal dari latar belakang sosial, ekonomi, dan geografis yang berbeda dalam aktivitas sehari-hari. Perubahan pola interaksi tersebut membentuk lingkungan sosial yang memungkinkan perpindahan penyakit berlangsung lebih luas dibandingkan periode ketika mobilitas penduduk masih terbatas.

Perubahan yang terjadi juga menunjukkan bahwa modernisasi tidak hanya menghasilkan pembaruan kelembagaan, tetapi turut mengubah cara masyarakat memaknai kesehatan dan penyakit. Sebagian kelompok mulai mengenal pendekatan medis yang diperkenalkan pemerintah kolonial, sedangkan kelompok lainnya tetap mempertahankan pengetahuan lokal yang telah lama berkembang. Kehadiran dua sistem pengetahuan tersebut menciptakan proses adaptasi yang berlangsung secara bertahap dalam kehidupan masyarakat. Pilihan terhadap bentuk pengobatan tertentu sering kali dipengaruhi oleh kemudahan akses, tingkat kepercayaan, kondisi ekonomi, serta pengalaman kolektif yang diwariskan antar generasi.

Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa pengalaman menghadapi penyakit tidak berlangsung secara seragam di seluruh lapisan masyarakat. Prajurit, pekerja perkebunan, pedagang, dan penduduk yang menetap di sekitar pusat-pusat ekonomi menghadapi tingkat paparan yang berbeda sesuai dengan intensitas mobilitas dan pola interaksi sosial yang mereka jalani. Perbedaan posisi sosial dan jenis pekerjaan ikut menentukan peluang seseorang untuk terlibat dalam jaringan kontak yang lebih luas. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa risiko kesehatan pada masa kolonial berkaitan erat dengan struktur sosial yang berkembang, bukan semata-mata ditentukan oleh pilihan individu.

Perkembangan administrasi kolonial juga mendorong lahirnya praktik pencatatan kesehatan yang semakin sistematis sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan modern. Aktivitas pendataan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen medis, tetapi juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam mengenali pola penyebaran penyakit dan menentukan langkah pengendalian. Informasi yang dihasilkan melalui proses administrasi tersebut memperlihatkan upaya negara untuk memahami kondisi masyarakat melalui pengumpulan data yang lebih teratur. Praktik semacam ini menandai perubahan penting dalam hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan kesehatan publik pada penghujung abad ke-19.

Pembacaan terhadap sejarah penyakit pada akhirnya memperluas pemahaman mengenai proses perubahan sosial yang berlangsung di Mangkunegaran. Penyakit tidak lagi dipandang sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari transformasi ekonomi, perkembangan kelembagaan, perluasan jaringan transportasi, dan perubahan pola hubungan antar manusia. Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa sejarah kesehatan mampu menjelaskan dinamika masyarakat dari sudut pandang yang berbeda dibandingkan kajian politik atau ekonomi semata. Analisis semacam ini memperkaya historiografi Mangkunegaran dengan menghadirkan dimensi kesehatan sebagai bagian penting dalam memahami proses modernisasi dan perubahan sosial pada abad ke-19.

SIMPULAN

Pembahasan ini menunjukkan bahwa penyakit menular seksual (PMS) di Praja Mangkunegaran pada paruh kedua abad ke-19 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan medis, melainkan sebagai fenomena sosial, politik, dan kultural yang berkembang seiring proses modernisasi militer dan transformasi ekonomi kolonial. Keberadaan Legiun Mangkunegaran sebagai satuan militer modern dengan tingkat mobilitas yang tinggi menjadi salah satu faktor utama yang mempercepat transmisi PMS, baik di kalangan prajurit maupun masyarakat sipil yang berinteraksi di sekitar garnisun dan pusat-pusat aktivitas ekonomi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penyakit berlangsung melalui jaringan mobilitas manusia yang semakin luas sebagai konsekuensi dari perubahan struktur sosial dan ekonomi pada akhir abad ke-19. Perspektif ini menempatkan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika modernisasi yang membentuk kehidupan masyarakat Mangkunegaran.

Modernisasi militer yang terintegrasi dengan kepentingan pemerintah kolonial menghasilkan konsekuensi yang bersifat ambivalen terhadap perkembangan masyarakat Mangkunegaran. Profesionalisasi Legiun Mangkunegaran memperkuat posisi politik dan militer praja dalam struktur kekuasaan Hindia Belanda, tetapi peningkatan mobilitas prajurit juga memperluas ruang interaksi sosial yang berpotensi mempercepat penyebaran penyakit. Pertumbuhan prostitusi, intensifikasi aktivitas ekonomi di pasar, serta berkembangnya ruang-ruang hiburan membentuk jaringan sosial baru yang memperbesar peluang terjadinya transmisi PMS. Transformasi ekonomi menuju kapitalisme perkebunan, terutama setelah pembangunan infrastruktur transportasi seperti jaringan kereta api, semakin memperkuat keterhubungan antarruang sekaligus memperluas jalur penyebaran penyakit.

Diskursus mengenai PMS di Mangkunegaran memperlihatkan adanya perjumpaan antara moralitas tradisional Jawa dan rasionalitas medis modern yang diperkenalkan melalui administrasi kolonial. Masyarakat memaknai penyakit sebagai pelanggaran terhadap norma moral sekaligus sebagai ancaman bagi kesehatan publik sehingga kedua perspektif tersebut berkembang secara berdampingan. Proses *medikalisasi* yang diperkenalkan pemerintah kolonial tidak sepenuhnya menggantikan mekanisme pengendalian berbasis norma lokal karena masyarakat tetap mempertahankan sanksi sosial, nasihat moral, dan praktik pengobatan tradisional sebagai bagian dari respons terhadap penyakit. Status Mangkunegaran sebagai praja semiotonom juga memungkinkan berlangsungnya proses adaptasi dan negosiasi terhadap kebijakan kesehatan kolonial sehingga implementasinya tidak selalu berlangsung secara seragam maupun konsisten.

Penelitian ini menegaskan bahwa PMS dapat digunakan sebagai lensa historis untuk memahami relasi kuasa, dinamika modernitas, dan perubahan sosial di Mangkunegaran pada abad ke-19. Penyakit tidak hanya merefleksikan kondisi biologis, tetapi juga mencerminkan perubahan struktur ekonomi, pola mobilitas penduduk, dan nilai-nilai budaya yang membentuk respons masyarakat terhadap intervensi kolonial. Pendekatan sejarah sosial-medis memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dengan menempatkan pengalaman kesehatan dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang saling berkaitan. Kerangka analisis tersebut menghasilkan pembacaan historis yang lebih kontekstual sehingga terhindar dari penilaian yang bersifat anakronistik terhadap dinamika masyarakat Mangkunegaran pada masa kolonial.

REFERENSI

- Alifatur, A. (2017). Politik Efisiensi Anggaran Mangkunegara VI Tahun 1911 - 1915. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1). <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/17774>
- Anugrah, A. H. A., Laurent, C., & Zabrina, H. C. Z. (2023). Fenomena Permasalahan Masyarakat Modern dalam Masyarakat Risiko. *Al Yazidiy Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1), 34–52. <https://doi.org/10.55606/ay.v5i1.269>
- Boomgard, P. (2004). Human Capital, Slavery and Low Rates of Economic and Population Growth in Indonesia, 1600–1910. In *Structure of Slavery in Indian Ocean Africa and Asia* (pp. 83–95). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203011256-6>
- Colombijn, F. (2013). *Under Construction: The Politics of Urban Space and Housing during The Decolonization of Indonesia, 1930-1960* (Vol. 246). Brill.
- Fadila, P., Farisa, R., Remal, S., Ketaren, A., Dwiastuti, W., Thoriq, M., Rafie, Z., Setiawan, P. A., Amelia, S. M., & Widyaardana, F. (2024). Perawan Remaja yang Dilupakan: Studi Kasus Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia 1942-1945. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4), 918. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14381457>
- Gritantin, L. A. L. (2022). Sejarah Penanggulangan Prostitusi di Wilayah Hindia Belanda oleh Pemerintah Hindia Belanda Tahun 1870 – 1920. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(4), 1139–1144. <https://doi.org/10.55681/sentri.vii4.354>

- Gritantin, L. A. L. (2024). Sejarah Kehidupan Sosial Para Anggota Korps Militer Hindia Belanda serta Pengaruhnya terhadap Perkembangan Penyakit Kelamin di Kalangan Korps Militer Hindia Belanda pada Tahun 1870-1920. *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(1), 205–212.
<https://doi.org/10.55681/sentri.v3i1.2155>
- Handayani, R., & Amini, M. (2024). Dari poliklinik hingga rumah sakit: upaya menyetatkan pekerja perkebunan di Mangkunegaran pada 1914 - 1930-an. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 25(1), 38–56. <https://doi.org/10.52829/PW.407>
- Hartanto, I. D., & Hudiyanto, R. R. (2023). Prostitusi Semarang Pasca 1852. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 6(1), 55–62. <https://doi.org/10.17509/historia.v6i1.42217>
- Herlina, N. (2020). *Metode Sejarah*. Satya Historika.
- Khofifah, A. N. (2023). History of Prostitution in Yogyakarta during the Colonial Era. *Jurnal Perempuan Dan Anak*, 6(2), 49–56. <https://doi.org/10.22219/jpa.v6i2.24133>
- Kintaningtyas, N., Djono, & Abidin, N. F. (2023). Ruang Publik di Praja Mangkunegaran Masa Mangkunegara VII. *Candi: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 23(1), 1–12.
<https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/84109>
- Mahardi, N. A. O., Qasthalani, M. F., & Putri, N. A. (2025). Perempuan dalam Arus Sejarah: Studi tentang Peran Prajurit Estri Pada Masa Mangkunegara I. *Pakarti: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sosial Budaya*, 1(1), 47–53.
<https://journal.ayeintegritas.com/index.php/JPPSB/article/view/6>
- Murti, A. W., & Nasution, N. (2021). Akulturasi Jawa-Eropa dalam Legiun Mangkunegaran di Surakarta (1900-1942). *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(2).
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/42892>
- Putri, A., & Ribawati, E. (2022). Penerapan Metode Neurosains dalam Pembelajaran Sejarah. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.22437/jejak.v2i1.18248>
- Putriani, R., & Suriani. (2026). Prostitution in Padang City 1891-1942. *Journal of Indonesian History*, 13(2), 1–12. <https://doi.org/10.15294/jih.v13i2.29424>
- Sarip, N. S., Pratiwi, A. R., Br. Sianturi, A. S., Hafifa, F., Sari, V. J., & Pratiwi, N. (2025). Kajian Litelatur : Gangguan Sistem Reproduksi Pada Perempuan dan Laki-Laki Di Era Modern. *Al Qodiri : Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan*, 23(3), 575–586.
<https://doi.org/10.53515/qodiri.2025.23.3.575-585>
- Victor, N., Mahmudhah, F., Prihatin, N. A., Zannierah, S., & Marzuki, S. (2025). Students' Understanding of Philosophical and Cultural Values of Yogyakarta's Special Status. *Langgam: International Journal of Social Science Education, Art and Culture*, 4(4), 1–10.
<https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/5901938>
- Yuliyanti, S. (2022). Perbudakan Seksual Perempuan Indonesia: Jugun Ianfu pada Masa Pendudukan Jepang Tahun 1942-1945. *Factum: Jurnal Sejarah Dan Pendidikan Sejarah*, 11(2), 229–238.
<https://doi.org/10.17509/factum.v11i2.41974>